

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka berikut penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan antara lain :

- 5.1.1 Bahwa dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 63 Tahun 2019 tersebut bertujuan untuk memberikan kebijakan kepada semua wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor khususnya di Nusa Tenggara Timur untuk memanfaatkan waktu selama bulan Agustus-Oktober 2019, untuk dapat membayar pajak sekaligus membayar iuran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sehingga kendarannya bebas dari denda keterlambatan serta berhak mendapat perlindungan dari asuransi kecelakaan apabila mengalami musibah setelah membayar iuran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
- 5.1.2 Bahwa apabila dikaitkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dimaksudkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka berikut penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai rekomendasi terutama kepada para pembuat peraturan perundang-undangan antara lain :

- 5.2.1 Memperhatikan bunyi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 tahun 2019 maupun Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sudah sesuai dengan ketentuan tersebut namun karena belum terlalu transparan dan mempunyai kekuatan mengikat maka perlu ditinjau kembali dan pemerintah harus selalu dan senantiasa lebih intensif dalam penangannya.
- 5.2.2 Untuk menghindari penafsiran yang keliru dan interpretasi yang berbeda terhadap konstitusi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 tahun 2019 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB Penyerahan Kedua dan seterusnya, serta Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah maka perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan-perubahan. Oleh karena itu, maka penulis dapat menyarankan kepada pembuat undang-undang agar perlu memperhatikan untuk dilakukan revisi atau dirubah kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006
- Bambang Purnomo, 1985., *Asas-asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia.
- Fajar Mukti ND, Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emiris*, 2010, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Balai Pustaka, Jakarta.
- , 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Arthajaya, Jakarta
- Indroharto, 2017, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, hal. 83.
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, (Russel, New York, P.113), dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan : dasar-dasar dan pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta. bandingkan pada alih bahasa Soemardi, 1995, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, Rimdi Press, Jakarta
- Mahendra Kurniawan, dkk, 2007., *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media), Cet. Ke 1
- Mahmud, Peter, Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, dalam Hans Kelsen , *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 1998),
- Moeljatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Pramadya, Yan, Puspa, 1977, *Kamus Hukum, edisi Lengkap bahasa Belanda, Indonesia, dan Inggris*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia
UNDANG-UNDANG/PERATURAN :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan :Perundang-Undangan.

Peatiran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010. Tentang **Pajak Daerah**

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 63 Tahun 2019 Tentang **Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya.**

KORAN :

Timor Expres, 1 Agustus 2019, *Berita Nusa Tenggara Timur*.

INTERNET :

<https://radarntt.co/news/2019/gubernur-ntt-luncurkan-tax-amnesty-kendaraan-bermotor/> diakses tanggal 02 April 2020. Jam 19.40.

<https://today.line.me/id/pc/article/Jasa+Raharja+dukung+penghapusan+denda+pajak+kendaraan+di+NTT-pjWN0e> diakses tanggal 03 April 2020 Jam. 20.05

<https://www.victorynews.id/kado-hut-ri-gubernur-vbl-hapus-denda-pkb-dan-bbnkb> diakses tanggal 04 April 2020 jam 20.15.

<http://indonesiasatu.co/detail/sejak-agustus--pemprov-ntt-terapkan-tax-amnesty-kendaraan-bermotor> diakses tanggal 04 April 2020 jam 20.30

https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN_ASAS_LEGALITAS_MENURUT_KUHP diakses tanggal 05 April 2020 jam 15.20

<https://today.line.me/id/pc/article/Jasa+Raharja+dukung+penghapusan+denda+pajak+kendaraan+di+NTT-pjWN0e> diakses tanggal 05 April 2020 jam. 19.25